

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya fungsi uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, uang tidak terlepas dari proses transaksi ekonomi di setiap negara. Uang juga dapat dikatakan sebagai indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan ekonomi yakni, produksi, distribusi dan konsumsi berkaitan erat dengan uang. Dalam Undang-Undang No. 23 tentang Bank Indonesia Pasal I angka 6 sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menetapkan bahwa sistem pembayaran berperan penting untuk memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Terselenggaranya sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan merupakan faktor penting untuk mendukung stabilitas keuangan dan moneter. Terdapat tiga jenis besaran moneter, yaitu *base money* (M0), *narrow money* (M1), dan *broad money* (M2).

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran, menjadi alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Pramono dkk, 2006). Pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cara transfer atau menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya kartu debit dan kartu kredit. Kemajuan teknologi membawa pada era *Less Cash Society* yaitu terciptanya instrumen pembayaran non tunai (Warjiyo, 2003). Peran



sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital bagi perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya sistem pembayaran bernilai besar. Kemudahan yang ditawarkan Alat Pembayaran Menggunakan kartu (APMK) menyebabkan volume dan jumlah transaksi semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Jumlah APMK Beredar

Periode	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kartu Kredit	180,569,919	177,118,303	186,259,726	197,788,678	170,677,139	223,072,552
Kartu ATM	51,140,970	68,802,521	81,024,697	91,734,483	78,399,613	100,849,796
Kartu Debet	795,991,001	936,090,362	1,071,300,918	1,271,972,726	1,203,441,011	1,707,132,093

Sumber : Bank Indonesia (2017)

Kemajuan yang cepat dalam teknologi, mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih efisien dan ekonomis. Menurut Warjiyo (2003), peran sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital bagi perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya sistem pembayaran bernilai besar. Keamanan dan efisiensi sistem tidak hanya mendukung pihak yang menggunakan secara langsung, tetapi juga sistem keuangan secara keseluruhan, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi seperti, alat SKNBI, sistem BI-RTGS dan terakhir mulai muncul *e-money*.

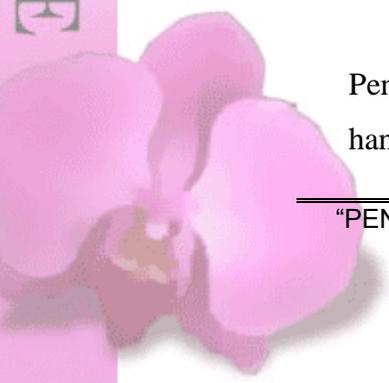
Hasil dari perkembangan teknologi informasi dalam sistem pembayaran adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu debit. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi membuat masyarakat beralih menggunakan instrument non tunai. Pola hidup masyarakat yang cenderung menginginkan sesuatu yang praktis dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal bertransaksi. Hal tersebut dapat meningkatkan volume transaksi pembayaran menggunakan kartu, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik.

Studi lain yang dilakukan oleh (Woodford, 2000) memiliki sudut pandang berbeda terhadap implikasi perkembangan alat pembayaran non tunai pada kebijakan moneter. Hasil studinya menunjukkan bahwa sekalipun uang kartal tersubstitusi oleh alat pembayaran non tunai kebijakan moneter tetap akan efektif. Bank sentral dalam hal ini tetap dapat mengontrol kebijakannya melalui tingkat suku bunga jangka pendek.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Costa dan Grauwe (2001), penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan uang terhadap uang yang diterbitkan oleh bank sentral, *base money*, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya pengendalian besaran moneter. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Freidman (1999), perkembangan teknologi informasi akan memberikan implikasi terhadap berkurangnya peran *base money* dalam transaksi pembayaran.

Menurut Pramono dkk (2006: 26) tambahan pendapatan ekonomi yang diterima konsumen dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Dewasa ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam dompetnya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Bagi Bank Indonesia, pengelolaan uang tunai membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan bagi masyarakat, transaksi non tunai akan lebih mudah, cepat, praktis, dan mengurangi resiko kejahatan (Nirmala, 2011).

Penelitian tentang teknologi sistem pembayaran menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan para ekonom untuk melihat pengaruhnya terhadap uang

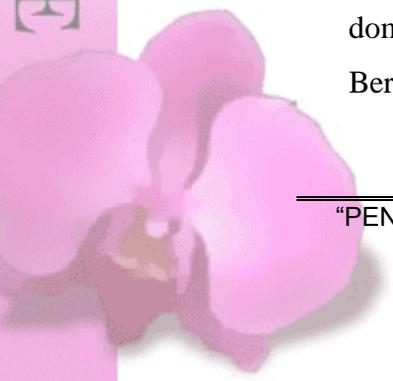


beredar dalam aktivitas perekonomian negara. Penggunaan kartu debit dalam bertransaksi berdampak terhadap berkurangnya transaksi uang tunai di sebuah negara. Banyak masyarakat beralih menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu dalam bertransaksi (Amronim dan Chakravirti, 2007). Kecenderungan arah perubahan sistem pembayaran tunai menjadi non tunai juga terjadi di banyak negara, diantaranya Jepang dan Eropa.

Hasil studi Syaifuddin (2009) mengenai alat pembayaran elektronik, menjelaskan bahwa biaya sistem pembayaran yang berkisar 2%-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan berkurang apabila pembayaran menggunakan uang kertas dapat digantikan dengan pembayaran elektronik. Biaya pembayaran elektronik hanya sepertiga sampai setengah kali dari biaya transaksi menggunakan uang kertas.

Penelitian yang dilakukan Odularu dan Okunrinboye (2008), memiliki hasil yang berbeda mengenai implikasi pembayaran non tunai terhadap permintaan uang. Dalam penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pengaruh pembayaran non tunai terhadap permintaan uang di Nigeria. Perkembangan pembayaran non tunai mempercepat pembayaran dengan resiko yang kecil dan menurangi biaya transaksi. Karena masih dalam tahap perkembangan, belum terlihat efek yang dirasakan pada aspek ekonomi secara keseluruhan.

Dengan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba menambah literatur dan melihat pengaruh penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu terhadap uang beredar di Indonesia. Perkembangan teknologi alat pembayaran dapat digambarkan dengan penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu. Jumlah uang beredar tidak hanya dipengaruhi oleh produk domestik bruto dan nilai tukar, namun juga teknologi sistem pembayaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul



“PENGARUH ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penggunaan alat pembayaran non tunai (kartu kredit, kartu debit, *e-money*, BI-RTGS, dan SKNBI) terhadap jumlah uang beredar di Indonesia?

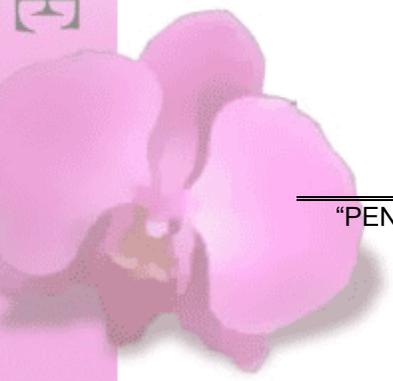
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang sistem pembayaran, alat pembayaran non tunai dan jumlah uang beredar.
2. Bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi informasi perkembangan sistem pembayaran non tunai dan pengaruhnya terhadap lembaga keuangan.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan perkembangan industri keuangan bank dan non bank yang berkaitan dengan pembayaran non tunai.



4. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan transaksi non tunai.
5. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

